

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014. LAKIP tidak hanya menjadi alat pelaporan kinerja tahunan, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi capaian sasaran strategis, pengukuran efektivitas program, serta dasar pengambilan keputusan berbasis kinerja di lingkungan birokrasi.

Pentingnya penulisan LAKIP terletak pada fungsinya sebagai alat ukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. LAKIP memberikan informasi yang sistematis, transparan, dan dapat di pertanggung jawabkan mengenai capaian kinerja organisasi, sekaligus menjadi dasar untuk evaluasi, perbaikan kebijakan, dan penyusunan program kerja tahun berikutnya. Dengan adanya LAKIP, pemerintah tidak hanya sekedar menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan, tetapi juga mampu menjelaskan bagaimana dana publik tersebut memberikan hasil (*outcome*) dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Proses penyusunan LAKIP memerlukan keterpaduan antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan hasil. Hal ini mencakup analisis terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU), penilaian efektivitas pengguna sumber daya, dan evaluasi terhadap kendala dalam pelaksanaan program. Penyusunan yang baik akan menghasilkan laporan yang informatif dan dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

LAKIP menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas

pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang di hasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Dengan menyusun LAKIP secara sistematis dan berdasarkan prinsip akuntabilitas kinerja, Dinas PUPR Kota Padang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah, untuk itu penulis dalam pelaksanaan magang penulis mengangkat judul **“Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Bidang Program dan Jasa Kontruksi (BPJK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, terdapat beberapa hal yang perlu dirumuskan lebih lanjut pada Bidang Program dan Jasa Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang, yaitu :

1. Bagaimana tahapan dan mekanisme penyusunan LAKIP pada bidang Program dan Jasa Kontruksi ( BPJK ) Dinas PUPR Kota Padang.
2. Apa saja kendala teknis dan administratif yang dihadapi dalam proses penyusunan LAKIP di BPJK Dinas PUPR Kota Padang.

### **1.3 Tujuan Magang**

Tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bidang Program dan Jasa Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.

### **1.4 Manfaat Magang**

Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Bagi Mahasiswa**

Magang sebagai rangkaian proses mempelajari praktik-praktik dalam instansi pemerintahan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa berupa pengetahuan dan pengalaman. Adapun manfaat yang didapatkan penulis setelah mengikuti kegiatan magang secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.
2. Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.
3. Untuk mendapatkan pengalaman dan pemahaman mengenai dunia kerja serta mengaplikasikan teori yang didapat penulis dengan implementasinya di dunia kerja.
4. Melengkapi salah satu persyaratan sebelum menyelesaikan studi.

### 1.4.2 Bagi Instansi

Mahasiswa magang membantu pelaksanaan tugas administratif dan teknis, sehingga meringankan beban kerja pegawai. Magang memperkuat hubungan kerja sama antara instansi dan dunia akademik dalam bentuk pertukaran ilmu dan pengalaman. dan Terjadi proses pembelajaran dua arah antara mahasiswa dan pegawai, yang dapat meningkatkan kualitas kerja dan inovasi.

### 1.4.3 Bagi Akademik

1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan berkeahlian profesional yang mampu bertahan dan bersaing dalam dunia kerja
2. Membangun dan mengembangkan hubungan antara dunia pendidikan atau perguruan tinggi dengan dunia kerja
3. Meningkatkan wawasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang sering terjadi di dunia kerja dan menciptakan kemampuan *problem solving* yang baik

## 1.5 Tempat dan Waktu Magang

### Tempat Magang

Magang dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang.

### Waktu Magang

Waktu Pelaksanaan magang dilakukan selama 40 hari kerja di mulai pada tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan 11 Maret 2025.

## **1.6 Sistematika Tugas Akhir**

Penulisan laporan magang terbagi berdasarkan lima bab yang di setiap babnya meliputi beberapa sub bab yang dirangkai menjadi suatu kesatuan kerangka pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I diuraikan terkait latarbelakang suatu masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat magang, serta sistematika penulisan laporan ahir magang.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada Bab II terdapat penjelasan terkait definisi laporan, akuntabilitas, kinerja, pengukuran kinerja, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu, juga terdapat pemaparan tentang manfaat pengukuran kinerja, prinsip, manfaat, fungsi, tujuan, waktu penyampaian, dan dasar hukum pemberlakuan LAKIP, serta pokok pembahasan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **BAB III GAMBARAN UMUM INSTITUSI**

Pada Bab III, terdapat menjabaran terkait sejarah singkat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang, panca prasetya, visi dan misi, penelaahan visi, misi dan program rencana pembangunan daerah, lokasi Dinas PUPR Kota Padang, struktur organisasi Dinas PUPR Kota Padang, sumber daya Dinas PUPR Kota Padang, serta tugas dan fungsi masing-masing bagian struktur organisasi pada Dinas PUPR Kota Padang.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada Bab IV, terdapat pembahasan detail dan merinci terkait proses penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.

## **BAB V PENUTUP**

Pada Bab V, memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penulisan laporan, sehingga dapat menjadi masukan bagi instansi pemerintah serta pihak-pihak yang berkepentingan di masa mendatang.

